Al imam : Jurnal Dakwah dan Manajemen
Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019, p. xx-xx
p- ISSN : 2086-12645 e-ISSN : 2685-8487
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam

PEMBANGUNAN KAPASITAS: STUDI MANAJEMEN PEMBERDAYAAN KELUARGA PADA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) DI SUMATERA BARAT

Edi Suandi[1]

[1]*STES (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah) Manna Wa Salwa*
Email: edisuandi18@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pembangunan kapasitas dan pembelajaran untuk menyelidiki bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat nagari di Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dan juga mengeksplorasi cara-cara di mana manjemen pemberdayaan dapat memberikan peluang dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat. Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus wadah koordinasi penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya memberikan hasil yang nyata dalam membangun pelayanan publik yang baik dalam mendukung program pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mensiasati kegiatan pos daya di masyarakat agar dapat berlangsung dengan sinergi dan berkelanjutan dengan terus membina dan mendampingi. Maka perlunya masing-masing aktor pembangunan meningkatkan peran-peran edukatif, fasilitatif, representatif dan teknis. Kegiatan posdaya membutuhkan relawan yang tidak hanya yang siap dalam hal fisik namun juga mental dan spiritual. Metodologi Penelitian : Literature Riview dan pendekatan studi kasus terhadap Posdaya-posdaya di Sumatera Barat.
Kata Kunci : Pembangunan kapasitas, Manajemen Pemberdayaan dan posdaya

Abstract

This paper discusses capacity building and learning to investigate how the development of rural community empowerment in West Sumatra Province increases welfare and poverty alleviation. And also explore ways in which empowerment management can provide opportunities and increase capacity for the community. The Posdaya program is a community-based program in which the formation process begins with a focus group discussion between communities by involving village / kelurahan governments and academics as facilitators. Posdaya provides tangible results in building good public services in supporting government programs. Therefore, local governments need to anticipate Posdaya activities in the community so that it can take place in synergy and sustainability by continuing to foster and assist. Then the need for each development actor increases the role of educative, facilitative, representative and technical. Posdaya activities require volunteers who are not only prepared physically but also mentally and spiritually. Research Methodology: Riview Literature and a case study approach to Posdaya in West Sumatra.

Keywords: Capacity building, Empowerment Management, Posdaya

1 Pendahuluan

Tulisan ini membahas tentang pembangunan kapasitas dan pembelajaran untuk menyelidiki bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat nagari di Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan tradisional untuk pengembangan kapasitas menekankan peran pendidikan dan pelatihan dalam transfer pengetahuan (Vallejo & Wehn, 2016). Chaskin, Brown, Venkatesh, dan Vidal (2001, p. 7) mendefinisikan kapasitas istilah sebagai membangun pada gagasan'' keduanya mengandung (memegang, menyimpan) dan kemampuan (pikiran, tindakan).” Inisiasi mencerminkan keyakinan bahwa beberapa sumber daya atau modal, seperti modal manusia atau fisik, sudah tersedia dalam masyarakat. Namun, konsep yang mendasarinya membutuhkan sumber daya yangbaik di dalam individu dan kolektif, dan bahwa kapasitas masyarakat memberikan dasar bagi proses ini juga bermasalah. Gagal menangkap cara-cara di mana kapasitas komunitas tidak sama-sama tersedia, dapat diakses, dan didistribusikan di antara kelompok-kelompok sosial. Istilah pembangunan kapasitas, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan ‘‘proses yang meningkatkan aset dan atribut yang dapat dimanfaatkan oleh suatu komunitas untuk meningkatkan kehidupan mereka”(Gibbon, Labonte, & Laverack, 2002, hlm. 485). Konformasi ini menunjukkan bahwa konseptualisasi hubungan antara peningkatan kapasitas dan pemberdayaan yang jelas dan masing-masing dampaknya terhadap pembangunan tidak ada.

Memahami dinamika komunitas mendasar yang mendorong proses-proses ini dapat dianggap sebagai prasyarat untuk mengidentifikasi dan terlibat dalam pengembangan kapasitas yang efektif. Jauh dari mewakili kelompok yang homogen atau stabil (Botchway, 2001), masyarakat didefinisikan oleh faktor geografis dan sosial budaya. Di dalamnya, kelompok sosial memiliki atribut dan endowmen aset yang berbeda (Chaskin et al., 2001). Khususnya, perempuan dan anak perempuan seringkali kurang beruntung dalam mengakses pelatihan dan pendidikan (Bank Dunia, 2011).

Penelitian ini mengeksplorasi cara-cara di mana pendidikan dan pemberdayaan dapat memberikan

peluang dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat. Dan tulisan ini akan memberikan tiga kontribusi orisinal untuk teori dan pengetahuan. **Pertama,**ia mengkritik konseptualisasi kapasitas masyarakat yang ada yang berfokus terutama pada aset dan atribut masyarakat. Makalah ini mengadopsi lensa yang menghubungkan dimensi pemberdayaan dan kapasitas masyarakat pada tingkat yang berbeda. **Kedua,** dengan menggunakan teori kognitif sosial untuk memperluas pemahaman tentang pembelajaran yang tertanam dan berjejaring dan proses pemberdayaan. **Ketiga,** memperluas literatur empiris di bidang ini.

2. Pembangunan kapasitas melalui lensa pemberdayaan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pemberdayaan perempuan, seperti yang disorot dalam kesetaraan gender dan laporan pembangunan Bank Dunia, 2011. Pendidikan meningkatkan akses keseluruhan individu ke peluang dalam kehidupan, dan dianggap sebagai korelasi kunci dari pemberdayaan (Gammage, Kabeer, & Rodgers,2016; Hanmer & Klugman, 2016; Samman & Santos, 2009; Subrahmanian, 2005).

Namun, sistem pendidikan formal juga mereplikasi norma sosial, nilai-nilai dominan dan pendorong. Ini lebih lanjut dapat meningkatkan ketimpangan dan ketidakberdayaan dalam masyarakat dengan mereproduksi hierarki dan pengecualian yang ada (Bivens, Moriarty, & Taylor, 2009). Penilaian proses pendidikan membutuhkan keterlibatan dengan geografi formal yang mendasari pengalaman belajar dan negosiasi kapasitas dan nilai-nilai masyarakat di dalamnya. Studi ini berfokus pada manajemen pengembangan kapasitas yang dibangun di atas proses kognitif, sosial dan budaya. Dengan demikian hal ini melampaui struktur formal dan informal dari sekolah dan komunitas untuk mengeksplorasi peluang untuk pertumbuhan, aspirasi dan pemberdayaan anak perempuan. Pengantar singkat konsep dan teori menginformasikan model pemberdayaan pengembangan kapasitas yang dikembangkan dalam penelitian ini berikut (lihat Gambar. 1).

2.1. Teori pembangunan kapasitas

Pengembangan kapasitas paling umum didefinisikan sebagai proses yang memiliki dimensi atau level yang

berbeda dilengkapi dengan tujuan tertentu (Simmons, Reynolds, & Swinburn, 2011). Atribut kapasitas komunitas berlaku untuk orang, dan untuk komunitas yang lebih luas dengan cara yang melampaui individu dan mencakup hubungan dan kelompok (Kwan, Frankish, Quantz, & Flores, 2003). Pengembangan kapasitas masyarakat selanjutnya didasarkan pada modal atau domain spesifik. Penulis biasanya menggambarkan antara empat dan sembilan aspek, seperti keterampilan dan pengetahuan, rasa kebersamaan, struktur sosial, sumber daya, partisipasi, kepemimpinan, dan kesadaran masyarakat (lihat mis. Chaskin et al., 2001; Gibbon et al., 2002). Konseptualisasi ini mencerminkan bahwa proses pengembangan kapasitas mengandalkan dan membangun kemampuan atau kemampuan yang ada dalam suatu komunitas dan pada sumber daya yang tersedia (lih. Vallejo & Wehn, 2016). Chaskin et al. (2001) menemukan kurangnya kejelasan tentang bagaimana aspek-aspek yang berbeda ini berhubungan satu sama lain (untuk pengecualian yang jarang terjadi, lihat Moreno et al., 2017). Model pada Gambar. 1 menunjukkan bagaimana proses pemberdayaan dan pembelajaran yang saling dipengaruhi dipengaruhi oleh dan mempengaruhi kapasitas masyarakat di tingkat yang berbeda.

2.2. Teori kognitif sosial

Teori kognitif sosial memberikan jalan untuk mempelajari tidak hanya faktor-faktor penentu lingkungan, tetapi juga fondasi psikologis pembelajaran dan pemberdayaan implisit (Bandura, 1997). Ini memberikan perspektif pengembangan kapasitas yang peka terhadap pengalaman budaya, pemikiran reflektif, dan keterikatan sosial dari perubahan. Teori kognitif sosial mengakui pengaruh budaya lokal pada konstruksi pengetahuan dan pembuatan makna (Vygotsky, 1978). Ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci untuk perkembangan kognitif seseorang dengan menekankan peran pembelajaran terpimpin dan observasional melalui pemodelan sosial (Bandura, 1998). Ini berfokus pada ‘changes perubahan perkembangan sepanjang rentang hidup dalam hal evolusi dan latihan agensi manusia” (Bandura, 2006, hal. 1). Keyakinan efikasi diri berfungsi sebagai mekanisme kunci agensi. Mereka mewakili kapasitas yang dirasakan

untuk bertindak, yang mempengaruhi fungsi manusia melalui proses motivasi, kognitif dan afektif (Bandura, 1991). Ini menopang pelaksanaan kontrol yang bertumpu pada kepercayaan individu atau kelompok dalam kemampuan penyebabnya (Bandura, 1997).

2.3. Teori pemberdayaan

Pemberdayaan, seperti pembangunan kapasitas, adalah konstruksi bertingkat yang mencakup proses dan hasil. Studi ini mengeksplorasi pemberdayaan pada tiga tingkat yang saling berhubungan: individu, hubungan dan kolektif (diadaptasi dari Rowlands, 1997). Ini mengintegrasikan perspektif agen tentang diri sejalan dengan definisi yang lebih luas dari pemberdayaan sebagai "perluasan kebebasan pilihan dan tindakan untuk membentuk kehidupan seseorang" (Narayan, 2002, hal. Xviii). Termotivasi oleh pendekatan kapabilitas Sen (1985, 1999), banyak sarjana menekankan pentingnya agensi dalam konsepsi pemberdayaan (lihat misalnya Gammage et al., 2016; Hanmer & Klugman, 2016; Ibrahim & Alkire, 2007; Samman & Santos, 2009). Studi ini berfokus pada pengembangan agensi sepanjang kendali pilihan yang berkisar mulai dari ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk bertindak atau memilih, dan menuju peningkatan rasa kontrol atas mengambil tindakan tertentu (Bandura, 1997) dan membuat pilihan tertentu (Kabeer, 2005). Ini adalah proses relasional yang inheren (lih. Christens, 2012; Rao, 2017) dibentuk oleh perubahan dari dalam, yaitu, pemberdayaan psikologis, dan pengaruh sosial-struktural yang beroperasi melalui persyaratan pengakuan (diadaptasi dari Appadurai,2004). Istilah-istilah ini menangkap interaksi dinamis antara proses pemberdayaan, nilai-nilai, norma dan wacana yang ada tertulis dalam kapasitas masyarakat dan pada gilirannya, membatasi pengembangan kapasitas.

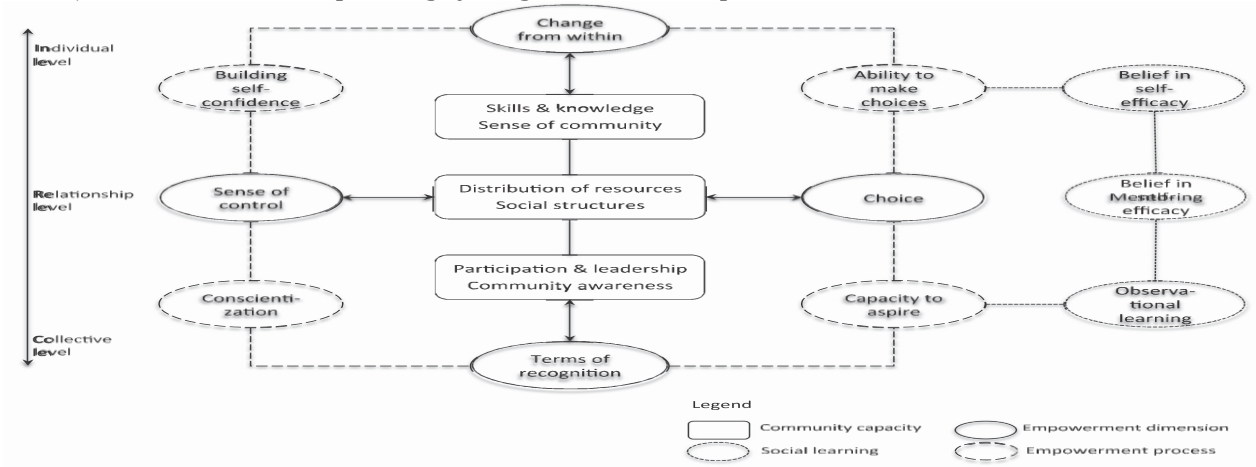

Fig. 1. Empowerment model of capacity building. Source: Authors, partly based on work by Appadurai, 2004; Bandura, 1997; Kabeer, 2005; Kwan et al., 2003; Rowlands,1997

2.4. Ubah dari dalam

Pendidikan dalam berbagai bentuknya adalah kunci dalam mengembangkan kapasitas manusia (Chiappero-Martinetti & Sabadash, 2014; Nussbaum,2003). Ini mengubah kemampuan kognitif dan kepercayaan diri individu untuk mempertanyakan, merefleksikan, dan bertindak berdasarkan kondisi kehidupan mereka dan untuk mendapatkan akses ke pengetahuan, informasi, dan ide-ide baru yang akan memungkinkan mereka melakukannya "(Kabeer , 2005, hlm. 16). Pertumbuhan kompetensi kognitif dibentuk oleh budaya dan muncul dari proses sosial (Vygotsky, 1978) yang membantu individu menyesuaikan diri dan memodifikasi lingkungan mereka (Bandura, 1997). Keyakinan tentang kapasitas diri merupakan mekanisme agensi yang penting (Bandura, 1991), dan berkaitan dengan meningkatnya perasaan kontrol dan kompetensi (lihat Zimmerman, Stewart, Morrel-Samuels, Franzen, & Reischl, 2011). Proses-proses pemberdayaan psikologis ini menyertai terbukanya ruang-ruang mental pemikiran dan ekspresi yang sebaliknya bisa diabaikan" (Nussbaum, 2003, p. 335).

Masa kanak-kanak merupakan waktu yang sangat penting di mana identitas pribadi dan sosial terbentuk (Baker, Lynch, Cantillon, & Walsh, 2004). Identitas sosial memerlukan anggapan peran yang secara inheren gender, dan harapan yang melibatkan komitmen internal dan eksternal yang signifikan (Okkolin, 2016; Shah, 2016). Akses ke panutan dan kelompok lain melalui sekolah dan pembangunan kapasitas dapat memberi makan pengembangan alternative diri dan memperkuat rasa memiliki dan solidaritas (lihat mis. Kabeer, 2011). Sementara menjadi kapasitas manusia universal, pemodelan sosial juga mewakili praktik budaya dan terstruktur sosial (Bandura, 2006). Ini mengisyaratkan proses pembelajaran informal yang kurang nyata melalui mana individu memperoleh rasa keberhasilan yang meningkat.

Extended peer networks sering membangun fondasi dari proses-proses

ini dan perasaan yang terkait seperti kepercayaan yang berasal dari keanggotaan kelompok (Christens, 2012, p. 118). Nussbaum (2003, hal. 335) menghubungkan pendidikan dengan prestise dan status sosial melalui kemampuan untuk membentuk hubungan sosial berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Choudhary (2016) menetapkan bahwa pendidikan memiliki efek pada penilaian wanita dalam masyarakat. - ety, anak perempuan harus mencapai setidaknya tingkat menengah. Demikian pula, Hanmer dan Klugman (2016) menemukan efek ambang yang berbeda tergantung pada tingkat pendidikan wanita dalam studi tentang kekurangan tenaga di 55 negara berkembang. Sementara hambatan dan hambatan untuk meningkatkan pemberdayaan berbeda dari masyarakat ke masyarakat dan bahkan di dalam masyarakat, ‘‘perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung tidak dibatasi” (Hanmer & Klugman, 2016, hal. 253). Pada gilirannya, mereka yang mengalami mobilitas (sosial) yang lebih besar dapat membawa pengetahuan kepada masyarakat, dan dapat mengubah tingkat pemahaman orang lain dan pengucilan sosial. Ini merefleksikan keanekaragaman kekuatan dan jalan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, yang bersama-sama dapat memfasilitasi perubahan untuk industri.

2.5. Rasa kontrol dan pilihan

Tulisan ini dibangun berdasarkan konseptualisasi multidimensi pemberdayaan, yang berfokus pada pemberdayaan dalam hubungan melalui kontinum pilihan kontrol menggambar pada karya Bandura (1997) dan Kabeer (2005). Perasaan kontrol individu memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat pilihan, dan secara inheren terkait dengan perubahan yang disebutkan sebelumnya dari dalam. Namun, penulis yang berbeda berpendapat untuk pemahaman relasional daripada tingkat individu pemberdayaan gender dan pengembangan kapasitas (Christens, 2012; Cornwall & Edwards, 2014; Hall, 2017; Rao, 2017; Shah, 2016; Uyan-Semerci, 2007). Studi ini mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok memperoleh kemampuan yang meningkat untuk bertindak dan membuat pilihan yang mereka hargai dalam dan melalui hubungan. Ini sejalan dengan definisi agensi Sen (lih. 1985, hal. 203), tetapi menggeser fokus ke arah pemahaman relasional agensi.

Tulisan ini mengacu pada teori kognitif sosial untuk mengoperasionalkan proses budaya dan relasional melalui mana manajemen pemberdayaan dapat mendorong kesejahteraan lembaga.

Dalam konteks pembelajaran sosial, perkembangan bergerak dari sosial ke individu (Vygotsky, 1978, 1987). Proses pembelajaran dan sosialisasi yang saling tergantung terjadi di rumah, di kolektif, dan, dalam kasus banyak masyarakat Afrika, melalui kebiasaan lisan secara eksklusif (Fennell & Arnot, 2008). Pembelajaran budaya, yang bersinggungan dengan tugas legit melegitimasi dan mendistribusikan berbagai bentuk budaya ”menyosialisasikan individu ke dalam praktik masyarakat (Baker et al., 2004, hlm. 144). Proses-proses ini secara diam-diam menginformasikan penilaian dan konstruksi pilihan (dan gender), yang memengaruhi kemampuan individu dan kelompok untuk bertindak. Secara khusus, masyarakat tradisional sering membatasi ruang sosiokultural, yang pada gilirannya menahan ruang mental (Deshmukh-Ranadive, 2005). Proses pembelajaran observasional dapat menginformasikan pola respons baru berdasarkan fitur perilaku yang ditampilkan oleh orang lain (Bandura, 1977). Misalnya, orang lain yang lebih berpengetahuan luas dan mentor memainkan peran penting dalam meningkatkan rasa kontrol dan pemahaman individu tentang peran orang dewasa (Zimmerman et al., 2011).

Pengalaman relasional agensi berkontribusi pada rasa kemanjuran kolektif yang lebih kuat (lihat Bandura, 1997; Rao, 2017) dan membayangkan masa depan. Namun, kemanjuran kolektif bukanlah jumlah dari keyakinan kemanjuran. Sebaliknya, ia muncul sebagai karakter tingkat hubungan berdasarkan dinamika interaktif dan kolaboratif (Bandura, 1997). Mengubah cara di mana pilihan berinteraksi dengan budaya mendukung individu dan kelompok dalam bergerak keluar dari pola kepasifan. Proses-proses ini tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Struktur sosial dan hubungan yang mereka wujudkan dan ‘‘reproduksi”, mewakili parameter dari kontinum pilihan kontrol. Mereka muncul dalam organisasi dan institusi lokal, dan dalam bentuk norma dan aturan serta kebiasaan yang mengatur komunitas (Narayan, 2005). Seiring waktu, mereka menjadi berurat berakar dalam wacana lokal yang mewakili ideologi yang diterima yang membangun fondasi hubungan

kekuasaan dalam masyarakat (Baker et al., 2004).

Mengembangkan kapasitas untuk bercita-cita merupakan proses budaya dan pemberdayaan dalam konteks ini. Aspirasi menunjukkan yang bernilai dan bermakna bagi individu (Hart, 2016) dan kelompok. Rasa kontrol yang meningkat dan tujuan bersama mendukung pengembangan aspirasi. ‘‘Ini dapat membuka kunci agensi yang diperlukan”(Conradie & Robeyns, 2013, hlm. 565) untuk mengatasi kendala gender terhadap aspirasi (DeJaeghere, 2016).

2.6. Ketentuan pengakuan

Ketentuan pengakuan merupakan bagian dari kerangka budaya yang mengatur masyarakat, dan menentukan dasar yang digunakan oleh kolektif (diadaptasi dari Appadurai, 2004). Kepemimpinan masyarakat dan partisipasi sering berfungsi sebagai (pra) syarat untuk pengembangan kapasitas yang efektif (Chaskin, 2001). Partisipasi luas, termasuk keterlibatan aktif kaum muda dalam perubahan komunitas, meningkatkan kapasitasity lintas level yang berbeda (lihat Zimmerman et al., 2011). Kelompok pertemanan dan jaringan sejawat dapat menyediakan jalur untuk mendapatkan status (Fennell & Arnot, 2008), dan untuk memulai proses berbagi pengetahuan dan pembelajaran kolektif. Namun, peningkatan kesetaraan (gender) di tingkat lokal tidak secara otomatis mengikuti (Friedmann, 1992).

Pemberdayaan harus mengambil beberapa bentuk budaya lokal untuk memiliki resonansi, memobilisasi penganut, dan menangkap debat di ruang publik”(Appadurai, 2004, hal. 67). Syarat-syarat pengakuan secara kritis berkaitan dengan keadaan dan pengekangan di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial bernegosiasi dengan nilai-nilai, dan norma serta wacana yang membentuk kehidupan sehari-hari mereka (Appadurai, 2004; lihat juga Ray, 2016). Ini berhubungan dengan argumen awal bahwa untuk membangun kapasitas di tingkat lokal diperlukan keterlibatan yang lebih kritis dengan kapasitas masyarakat dan negosiasi gender. Bockstael (2017) menyoroti pentingnya memungkinkan anggota masyarakat untuk menantang status quo. Ini membutuhkan langkah-langkah yang ‘‘sadar gender dan transformatif dari hubungan gender dan cara mereka beroperasi, dalam kemungkinan yang ditawarkan oleh lingkungan yang

dipertanyakan"(Subrahmanian, 2005, p. 406).

3. ProfilPogram Pos PemberdayaanKeluarga

3.1. Manajemen Pengelolaan Posdaya

Pada pelaksanaan kegiatan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) perlu dipersiapkan manajemen pelaksanaan oleh pemrakarsa atau tim penyelenggara yang dibentuk khusus untuk pembentukan Posdaya. Pilihan organisasi atau manajemen diserahkan pada masing-masing Posdaya. Posdaya perorangan bisa saja manajemennya sangat sederhana dan diatur sendiri oleh pengambil prakarsa Posdaya atau oleh keluarga yang berkepentingan.

Minsalnya Manajemen Posdaya dalam lingkungan masjid bisa dibentuk oleh suatu tim yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Manajemen Posdaya yang dibentuk oleh suatu perusahaan diatur oleh suatu tim yang dikembangkan oleh perusahaan sponsor Posdaya tersebut. Dengan kata lain, Posdaya sebagai milik masyarakat sebaiknya diatur manajemennya oleh masyarakat yang bersangkutan.

Namun, karena kegiatan Posdaya yang selalu berkembang, maka pengelolaan Posdaya, agar dapat berjalan secara teratur, berkelanjutan, dan berkembang, sebaiknya diatur dan diselenggarakan oleh suatu tim penyelenggara. Tim penyelenggara tersebut bertanggung jawab kepada sponsor dan difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Tujuannya adalah agar lebih mudah memperoleh komitmen yang tinggi dari unsur pemerintahan.

Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan Posdaya para kader dianjurkan mengikuti pelatihan atau selalu menambah ilmu dan pengetahuan tentang masalah pemberdayaan keluarga. Para kader mengatur kegiatannya sesuai dengan kebutuhan anggotannya. Karena itu para kader harus rajin menjajagi kebutuhan anggotanya dan mencari referensi untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

Waktu pemberian informasi dan ajakan untuk berpartisipasi bisa dilakukan secara terpadu atau mengambil waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan dari sasaran. Sebagai contoh, setiap minggu pertama dilakukan pemberdayaan dalam bidang KB dan kesehatan, pada minggu kedua diisi dengan pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan pada minggu ketiga diisi

dengan pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan. Apabila kegiatan makin meningkat, bisa saja diadakan pertemuan khusus bagi keluarga yang memiliki anak balita untuk membahas secara khusus masalah-masalah tentang perkembangan anak balita. Begitu juga dengan keperluan lainnya.

Pokja (Kelompok Kerja) dan para kader harus selalu mencari terobosan agar para anggota Posdaya selalu tertarik untuk datang dan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Posdaya tempat mereka bergabung. Jika Posdaya tidak memiliki daya tarik lagi, hampir pasti anggotanya tidak ingin berkumpul atau datang lagi ke Posdaya untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan.

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah untuk membangun sumber daya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan tersebut diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja keras mengentaskan kebodohan, kemalasan, dan kemiskinan dalam arti yang luas.

Kalau pembentukan dilakukan oleh suatu organisasi masyarakat, maka pemrakarsa dapat memberi tugas kepada petugas yang ditugaskan di desa dan di kecamatan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar berjalan lancar. Pada proses perintisan tim kerja atau petugas di desa dan di kecamatan perlu mengkoordinasikan dan menggalang kerjasama dengan semua pihak yang mempunyai kaitan langsung, misalnya Camat, Pimpinan Puskesmas, Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB), Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan, Organisasi Sosial dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan, Petugas Pemberdayaan Masyarakat atau Bangdes, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, Pimpinan berbagai kursus, Tim Pengerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

SetelahpengurusintiPosdayaterbentuk, langkahselanjutnya adalahmelakukan identifikasi keluargayangmenjadianggotanya atauyangtinggaldalamlingkungan Posdaya. Pengurus membentuktimataukelompokkerjauntukmenanganibidang-bidang garapandalamPosdaya. Kelompok kerja ini bertugas untuk melaksanakan tugas keseharian organisasi dan sekaligus kaderisasicalonpemimpinmasadepan.

3.2 Strategi Manajemen Pelayanan Publik melalui Pos Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan posdaya memberikan kesan di masyarakat dengan beberapa kegiatan berupa layanan pendidikan, agama, kesehatan ekonomi dan lingkungan. Kegiatan ini terus perlu disinergikan dengan masing-masing bidang yang berlangsungdiposdaya. Secaravertikal perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk dapat mensinergikan aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan kesan merebut pekerjaan orang lain. sebuah strategi komunikasi pemberdayaan dalam membangun layanan publik yang berdayasaing,sandingdansaringsehingga mampuprimamelayanimasyarakathingga masyarakatmampumandiri.

Peranserta pemerintah tidak lagi hanya menunggu namun masyarakat dapat melakukan perannya dengan memberdayakan warga sekitarnya Hal ini berbanding lurus dengan adanya pemberdayaan di masyarakat akan berdampak pada layanan publikyangbaik. MenurutSulistyowati dan Dibyorin (2013:587) di mana perlu dirancang kebutuhan bersama masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pembangunan, sehingga otomatis indeks pembangunan manusiaakanmeningkat denganbaik.Untukitu,diperlukanstrategi komunikasi pelayanan publikdengan melihat pada aspek kebutuhan masyarakat dengan membangun*mutual trus*t di dalam pelayanan publik. Amanah dan Farmayanti (2014:40) merekomendasikan, perlu adanya sistem kelembagaan yang memberikan ruang kepada lembaga pemerintah untuk mampu melakukan peran dan peningkatan akses serta perbaikan manajemen informasi.

Pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan pendekatan komunitas antara lain: (1) pemberian perhatian yang lebih kepada aspek permasalahan yang terjadi di masyarakat.(2)Perlunyaaktorpendamping atau fasilitator maupun penyuluh yang dapat membangun kreatifitaskomunikasi di masyarakat sehingga komunikasi yang terjadi menjadi dinamis dan demokratis. (3) Perlunya dibangun media interpersonal yangbersifarpersuasifdaninformatifdalam menjalankan kegiatan pemberdayaan yang berbasis pelayanan publik. (4)

Perlunya memperhatikanaspekbahasalokaldimana. Susanti (2015:252) melihat bahwa tujuan sentralkomunikasiadalah (a) *to secure understanding*, dimana komunikan harus dipastikanbahwatelahmenerimainformasi tersebut, (b*) to establish acceptance*, perlunya pembinaan terhadap komunikan sehingga terjalin kesinambungan pesan, (c*) to motive action*, kegiatan komunikasi tersebut harus terus dimotivasikan hingga menghasilkankeberdayaanmasyarakat.(5) perlu memperkuat jaringan *(networking)* komunikasi personal dan lembaga dalam membangun pemberdayaan yang kritis untuk meningkatkan pelayanan publik. (6) perlunya membangun kesadaran bersama masyarakat bahwa pelayanan publik tidak akan terlepas dari pemberdayaan dan tidak adaarti pemberdayaantanpapartisipasi masyarakat secara langsung.

Beberapahalyangperludiperhatikandalam strategi komunikasi adalah komunikator, pesan, khalayak, media yang digunakan dan efeknya terhadap khalayak agar dapat diterima. Strategi komunikasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pemberdayaan. Pada kajian posdaya siapa yang menjadi aktor pelaku adalahmasyarakatsebagaisubjekdanobjek sedangkan pemerintah sebagai regulator yangmemberikanpendanaandanabergulir. Perguruantinggiberperansebagaifasilitator dalammembinamasyarakat. Adanya tripartitantarapemerintah,masyarakat dan akademis (PMA) membentuk suatu sinergi yang dapat membangun komunitas yang berdaya.

Pesan yang disampaikan adalah programpembangunan yang telah disusun bersama masyarakat melalui kelompok kecil dalam komunitas dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar berupa aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan pada tingkatan mikrodimasyarakat.Pesandisosialisasikan melaluikomunikasilangsung melaluitatap muka dan komunikasi bermedia melalui posterdanleaflet. Jarangsekalipesan disampaikan melalui media massa seperti koran, majalah, radio maupun televisi.

Hal yang menarik adalah fase diawal pembentukan program posdaya banyak menggunakan media berupa majalah sebagaipenyambungpesanmedialangsung dengan kunjungan dan pertemuan melalui jamboreposdaya.Halinimasihberlangsung setiap tahunnya namun peserta yang mengikuti sedikit demi sedikit mengalami

penurunan. Tujuankomunikasiinibersifat memperkenalkan dan mambangun daya tawar posdaya di masyarakat. Komunikasi antarpengurus posdaya se-Bogor Raya dilakukan dengan melalui media sosial dan pertemuan setiap tiga bulan dengan membangun dan pemecahan masalah yangdihadapidi masing-masing posdaya. Pesan yang disampaikan di kelompok dilakukan dengan media langsung dengan beberapa kegiatan yang telah disusun dan diinformasikan kepada warga melalui pengerassuaradimasjidmaupunpengajian sertadarimulutkemulut. Setiapkegiatan dalam posdaya senantiasa didampingi fasilitator dari penyuluh dari pemerintah baikdaripertanian,kesehatandankeluarga berencana serta pelibatan perguruan tinggi sebagai mediator antar warga dan lembaga pemerintah.

Efek yang diharapkan dari strategi komunikasi adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi di komunitasnya terutama dalam memanfaatkan layananpublikyangbersifatdasar. Efek tersebut mampu membangun komunikasi yang intens dalam menciptakan kelompok yang produktif sehingga mampu memberdayakankomunitasdanmasyarakat.

Haliniditunjangolehpenelitian Pamungkas *etal.*(2013:8)bahwapeningkatanaktivitas komunikasi kader dan masyarakat mampu memberdayakan masyarakat sehingga menciptakan komunikasi partisipatif.

Hal ini memudahkan informasi dan akses masyarakat dalam menikmati layanan public, Susanto (2010:120) mendukung pernyataantersebutbahwapelayananpublik yang baikditunjangolehkekuatansosial,ekonomi, danpolitik kelompokdimasyarakat. Selain itu pemerintahperlu memberikanpeluang yang besar dalam komunitas masyarakat dalam menciptakan ruang komunikasi dan demokrasi dalam program-program yang bersifatmemandirikanmasyarakat. Membandingkan penelitian dari Susanti (2015:253) bahwa strategi komunikasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasionalProvinsiDIY dalam mensosialisasikan program Generasi Berencanabelumefektifdanbelumberhasilda lam mendayagunakankomunikasi sebagai perubahan sosial dikalangan kehidupan remaja.Komunikasimerupakanprosessosial yang terjadiakibat pembentukan definisi yang membentuk sosialisasi nilai dengan menyebarkan pesan serta memberikan

pemahamandan perubahan perilaku di masyarakatterlebihsuatukomunitasprogra m posdaya.Programposdayaperlumenjadiprog ramyangterusdimonitordanevaluasiolehseti ap *stakeholder,* pemerintahhendaknyatetap memberikan kail kepada masyarakat dengan membangun semangat masyarakat untuk berusaha dan membangun komunitas yang berdayasaing.

Zamzami (2011:120) menyatakan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan partisipatif berposisisebagai fasilitator dalam mendukung rencana pembanguan yang telah disepakati bersama berjalan sebagaimanamestinya sehingga membentuk masyarakat yang tangguh dan berkesinambungan. Hal ini secara tidak langsung membangun kesadaran publik bahwa membangun layanan publik tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun perlu sinergi dari masyarakat dan lembaga swadaya serta korporasi dalam membangunkomunikasiyangtransparandan mandiri.

4. Kesimpulan

1. Tulisan ini membahas tentang pembangunan kapasitas dan pembelajaran untuk menyelidiki bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat nagari di Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
2. Tulisan ini juga mengeksplorasi cara-cara di mana manjemen pemberdayaan dapat memberikan peluang dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat. Dan tulisan ini akan memberikan tiga kontribusi orisinal untuk teori dan pengetahuan. **Pertama,**ia mengkritik konseptualisasi kapasitas masyarakat yang ada yang berfokus terutama pada aset dan atribut masyarakat. Makalah ini mengadopsi lensa yang menghubungkan dimensi pemberdayaan dan kapasitas masyarakat pada tingkat yang berbeda. **Kedua,** dengan menggunakan teori kognitif sosial untuk memperluas pemahaman tentang pembelajaran yang tertanam dan berjejaring dan proses pemberdayaan. **Ketiga,** memperluas literatur empiris di bidang ini.
3. Program posdaya merupakan program berbasis masyarakat di mana proses terbentuknya

diawali dengan diskusi kelompok terarah antarmasyarakat dengan melibatkanpemerintahdesa/kelurahanserta akademisi sebagai fasiliatator. Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edu- kasi dan sekaligus wadah koordinasi penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya sebagai wahana pemberdayaan yang meliputi delapan fungsi keluarga secara terpadu meliputi fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha serta fungsi lingkungan (Muljono *et al* (2014:5).

4. Posdaya memberikan hasil yangnyata dalam membangun pelayanan publik yang baik dalam mendukung program pemerintah. Karena itu, pemerintah daerahperlumensiasatikegiatanposdaya di masyarakat agar dapat berlangsungdengan sinergi dan berkelanjutan dengan terusmembinadanmendampingi.

Hasil penelitian Kusumadinata dan Fitriah (2016), pemerintah, korporasi, perguruan tinggi serta masyarakat perlu senantiasa berkoordinasi yang tak terputus dan berkesinambungan dalam menciptakan iklim pemberdayaan di masyarakat. Maka perlunya masing-masing aktor pembangunan meningkatkan peran-peran edukatif, fasilitatif, representatif dan teknis. Kegiatan posdaya membutuhkan relawan yang tidak hanya yang siap dalam halfisik namunjugamentaldanspiritual. Sehingga dibutuhkan kaderisasi relawan yang mampu memiliki kemampuan daya- daya tersebut untuk menjalankan peran- peran pemberdayaan untuk menggerakkan masyarakat. Posdaya merupakan salah satu miniatur layanan publik berbasis pemberdayaan namun hal ini tidak disadari oleh pelaksana pembangunan. Karena itu, pemberdayaan di Posdaya mutlak harus dilakukan dengan berbagai pendekatan khususnya komunikasi persuasive.

DAFTAR PUSTAKA

*Appadurai,A.(2004).The capacitytoaspire:Culturean dthetermsofrecognition.*In V. Rao &M. Walton (Eds.),Cultureand publicaction:Across-disciplinarydialogue on development policy (pp. 59–84). Washington: World BankPublications.

Baker,J.,Lynch,K.,Cantillon,S.,&Walsh,J.(2004).Equality: Fromtheoryto action.NewYork:PalgraveMacmillan.

Bandura,A.(1977).Social learningtheory.EnglewoodCliffs, NJ:PrenticeHall.

Bandura,A.(1991).Cognitivetheoryofmoralthoughtandaction.InW. M.Kurtines

Bandura,A.(1997). Self-efficacy:Theexerciseofcontrol. NewYork:Freeman.Bandura, A. (1998).Personalandcollectiveefficacyinhumanadaptation andscience.Personal,socialand culturalaspects(1, pp. 51–71).Hove:PsychologyPress.

Bandura,A. (2006).Adolescentdevelopment fromanagenticperspective.In F.Pajares &T. Urdan (Eds.), Self-efficacybeliefs of adolescents(pp. 1–43).Greenwich,Connecticut :InformationAge Publishing.

Bivens, F., Moriarty, K., &Taylor, P. (2009).Transformativeeducationandits potentialfor changingthelivesof childrenindisempoweringcontexts.IDS Bulletin,40(1),97–108.https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2009.00014.x.

Bockstael,E.(2017).Criticalcapacitydevelopment:Anaction research approachin coastal Brazil.WorldDevelopment,94, 336–345. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.017.

Botchway,K.(2001).Paradoxof empowerment: Reflectionsonacasestudyfrom Northern Ghana.WorldDevelopment,29(1),135–153.

Bussey,K.,&Bandura,A.(1999).Socialcognitivetheoryofgenderdevelopmentanddifferentiation. PsychologicalReview,106(4), 676–713.

Charrad,M.M.(2011).Genderinthe middleeast:Islam,state,agency.AnnualReviewofSociology,37(1),417–437.https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102554.Chaskin,R.J.(2001).BuildingCommunitycapacity:Ad

efinitionalframeworkand36(3),291–323.

Chaskin,R. J., Brown,P., Venkatesh,S., &Vidal, A. (2001). Building community capacity.NewYork:Aldinede Gruyter.

Chiappero-Martinetti,E., &Sabadash,A. (2014).Integratinghuman capitalandhumancapabilitiesin understandingthevalueofeducation. InS.Ibrahim&M.Tiwari(Eds.), The capabilityapproach: Fromtheoryto practice(pp.206–230).London:PalgraveMacmillan.

Choudhary,N.(2016).Resourceaccessandstatusversus valuesandagency:Isthere a correspondence? GenderIssues,33(3),235–257. https://doi.org/10.1007/s12147-016-9150-0.

Christens, B. D. (2012). Toward relationalempowerment. AmericanJournalofCommunityPsychology,50(1–2),114–128.https://doi.org/10.1007/s10464-011-9483-5.

Conradie, I., &Robeyns, I. (2013). Aspirationsand human development interventions. Journalof HumanDevelopmentandCapabilities,14(4),559–580. https://doi.org/10.1080/19452829.2013.827637.

Cornwall,A.,&Edwards,J.(2014).Negotiatingempowerment.In A.Cornwall&J.Edwards (Eds.),Feminisms,empowerment anddevelopment:Changingwomen'slives (pp.1–31).London:Zed Books.alternativefutures through schooling in a low-resourced Tanzanian community. Critical Studiesin Education, 1–19. https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1188835.

Deshmukh-Ranadive,J.(2005).Gender,powerandempowerment: An analysisofhouseholdandfamilydynamics.In D.Narayan(Ed.), Measuringempowerment:Cross-disciplinary perspectives(pp. 103–121). Washington: World BankPublications.Eccles,J.S.(1994).Understandingwomen'seducationalandoccupationalchoices.PsychologyofWomenQuarterly,18, 585–609.

Fennell, S., &Arnot, M. (2008).Decentringhegemonicgendertheory: the implicationsfor educational research. Compare, 38(5),525–538.https://doi.org/10.1080/03057920802351283.

Flick, U. (2009).An introductionto qualitativeresearch(fourth ed.).London:SagePublications.

Freire,P.(1974).Educationfor criticalconsciousness.London:SheedandWard.Freire,P.(1998).Culturalactionandconscientization.HarvardEducationalReview,68(4),499–521.

Friedmann,J.(1992).Empowerment:Thepoliticsofalternativedevelopment.Oxford:BlackwellPublishers.

Gammage,S.,Kabeer,N.,&Rodgers,Y. vanderM.(2016).Voiceandagency:Wherearewenow? FeministEconomics,22(1),1–29.

Gibbon,M., Labonte,R., &Laverack,G. (2002).Evaluatingcommunity capacity.Healthandsocialcareinthe community,10(6),485–491.

Green,G.P.(2010).Communityassets:Buildingthecapacityfor development.InG.P. Green &A. Goetting (Eds.), Mobilizingcommunities: Asset building as acommunitydevelopmentstrategy(pp.1–13).Philadelphia:TempleUniversity.

HaryonoSuyono&RohadiHaryanto.2009.*Buku PedomanPembentukandanPengembanganPos PemberdayaanKeluargaPosdaya*.Jakarta:BalaiPustaka.

Hall,K.M.Q.(2017).Introducingjointcapabilities:findingsfromastudyofdevelopment inHonduras' Garifunaancestral villages.Journalof HumanDevelopment and Capabilities,18(1),60–74.https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1199168.

Hanmer,L.,&Klugman,J.(2016).Exploringwomen'sagencyandempowermentindevelopingcountries:Wheredowestand?FeministEconomics,22(1),237–263.Harper,D.(2002). Talkingaboutpictures:Acasefor photoelicitation.Visual Studies,17(1),13–26.https://doi.org/10.1080/1472586022013734.

Hart,C.S.(2016).Howdoaspirationsmatter? JournalofHumanDevelopmentandCapabilities,17(3),324–341 https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1199540.Ibrahim, S., &

Alkire, S. (2007). Agencyand empowerment: A proposal forinternationally comparable indicators. OxfordDevelopmentStudies,35(4),379–403.https://doi.org/10.1080/13600810701701897.

ICFInternational.(2005).Moroccodemographicandhealthsurveys 2003–04FinalReportmapr43dt.zip.Calverton,Maryland.

Kabeer, N. (2011).Betweenaffiliationand autonomy: Navigatingpathways of women'sempowermentandgenderjusticeinruralBangladesh.Development andChange,42(2),499–528.https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2011.01703.x.

Kearney,K.S.,&Hyle,A.E.(2004).Drawingoutemotions:The useof participant-produceddrawingsinqualitativeresearch. QualitativeResearch,4(3),361–382.King,N., &Horrocks,C. (2010). Interviewsinqualitative research. London: SagePublications.

Klein,E.(2014).Psychologicalagency:Evidencefromtheurbanfringeof Bamako.WorldDevelopment, 64, 642–653. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.001.

Kram,K. E. (1983).Phasesof thementor relationship. Academyof ManagementJournal,26(4),608–625.

Kwan, B., Frankish,J., Quantz,D., &Flores, J. (2003).A synthesispaper on theconceptualization and measurement of community capacity. Vancouver: UniversityofBritishColumbia.

Moreno,J.M.,Noguchi,L.M.,&Harder,M.K.(2017).Understandingtheprocessof community capacity-building: A case study of two programs in Yunnan Province, China. World Development, 97, 122–137.https://doi.org/10.1016/ j.worlddev.2017.04.005.

Mullen,C.A.(2012).Mentoring:Anoverview.InS.J.Fletcher&C.A.Mullen(Eds.),SAGEhandbookofmentoring andcoachingineducation(pp.7–23).London:SAGE.

Muljono, P., Burhanuddin, dan Bakhtiar, Y. (2010). Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Model Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga). Di dalam *Prosiding Seminar Hasil-Hasil PenelitianIPB2009;Bogor,22-23Des2009. Bogor*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut PertanianBogor;2010.Hal405-414.

Muljono, P., Bakhtiar, M.Y., Mintarti, dan MHK,P.D.(2014).*101CaraMengenal Posdaya*(edisikelima). Bogor:IPB Press.

Narayan,D.(2002).Empowermentandpovertyreduction:Asourcebook. Washington:The WorldBank.

Narayan,D. (2005).Conceptualframeworkandmethodologicalchallenges.In D.Narayan (Ed.), Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives(pp.3–38).Washington:WorldBankPublications.

Nussbaum,M. C. (2003).Women'seducation: A globalchallenge. Signs, 29(2),325–355.

Okkolin,M.-A. (2016).Whodecides?Tanzanianwomen'snarrativeson educational advancement andagency.GenderandEducation,28(7),886–902.https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1124069.

Pink,S.(2001).Doingvisualethnography. London:SagePublications Ltd.

Rao, N.(2017).Assets,agencyandlegitimacy:Towardsarelationalunderstanding of genderequality policyandpractice.WorldDevelopment,95, 43–54.https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.018.

Ray, D. (2016).Aspirationsandthedevelopment treadmill. Journalof HumanDevelopmentand Capabilities,17(3), 309–323. https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1211597.

Rowlands,J.(1997).Questioningempowerment:Workingwithwomen in Honduras.Oxford:Oxfam.

Sadiqi,F.(2003).Women,genderandlanguagein Morocco.Boston: Brill AcademicPublishers.

Samman,E.,&Santos,M.E.(2009).Agency andempowerment:Areviewofconcepts,indicators and empirical evidence. Oxford: Oxford Poverty and HumanDevelopmentInitiative,UniversityofOxford.

Sen, A. (1985).Well-being,Agencyandfreedom: The dewey lectures1984.TheJournalofPhilosophy,82(4),169–221.

Sen, A.(1999).Developmentasfreedom.Oxford:OxfordUniversityPress.

Shah, P. P. (2016).Agencyasnegotiation:Socialnorms,girls'schoolingand marriageinGujarat,India. In J.G.DeJaeghere,J.Josić,&K.S.McCleary(Eds.), Education and youth agency: qualitative case studies in global contexts (pp.85–102).Cham:Springer.https:

//doi.org/10.1007/978-3-319-33344-1.

Simmons,A.,Reynolds,R.C.,&Swinburn,B. (2011). Definingcommunitycapacitybuilding:Isitpossible? PreventiveMedicine,52, 193–199.measurements. InternationalJournalofEducationalDevelopment,25, 395–407.

Triandis,H. C.(1989).The selfandsocialbehaviorindiffering culturalcontexts.PsychologicalReview,96(3),506–520.

UNESCO (2000).The dakarframeworkfor action,education for all: Meetingourcollectivecommitments.Paris:UNESCO.

Unterhalter,E.(2008).Globalvaluesandgenderequalityineducation:Needs,rightsandcapabilities.InS.Fennell&M.Arnot(Eds.),Gendereducationandequalityinaglobalcontext:Conceptualframeworksandpolicy perspectives(pp.19–34).London:Routledge.

Uyan-Semerci,P. (2007).Arelationalaccountof Nussbaum'slistof capabilities.Journal of Human Development,8(2), 203–221. https://doi.org/10.1080/14649880701371034.

Vallejo,B.,&Wehn,U.(2016).Capacitydevelopmentevaluation:The challengeof theresultsagendaandmeasuringreturnoninvestmentintheglobal south. WorldDevelopment,79, 1–13.https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.044.

Vince,R.,&Warren,S.(2012).Participatoryvisualmethods.InG.Symon &C.Cassell(Eds.), Qualitativeorganizationalresearch:Core methodsandcurrentchallenges(pp.275–295).London:Sage.

Vygotsky,L.S.(1978).Mindinsociety.London:HarvardUniversityPress.

Vygotsky,L.S.(1987).Thecollectedworksof L.S.Vygotsky.Vol.1,problemsofgeneralpsychology:Including the volumethinkingandspeech.London:Plenum (R. W.Rieber&A.S.Carton,Eds.).

Wilson, D. (2004).Humanrights: Promotinggenderequalityin andthrougheducation.Prospects,34(1),11–27.

WorldBank(2011).Worlddevelopment report2012:Genderequalityanddevelopment.Washington:WorldBankPublications.

WorldEconomicForum(2016).The globalgendergap report2016.Worldeconomic

forum(vol.25) Geneva:WorldEconomicForum.https://doi.org/10.1177/Yin, R.K.(2014).Case studyresearch:Designandmethods(5thed.).London:Sage Publications.

Tilaar, *Menejemen Dakwah Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003

Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, Yogyakarta : Andi, 2003

Widjaja Tunggal, Amin., *Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Yamit, Zulian, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Yogyakarta: CV Adipura, 2001